



MANAJEMEN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI POTENSI BENCANA DI KABUPATEN SUMEDANG

Ida Yunari Ristiani^{1,2}

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

²Corresponding author: idayunarir@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Preparedness Management to face disaster Sumedang Regional Government in synergy with the TNI / Polri, Basarnas, BPBD, and Disaster Volunteers. Data from the Sumedang BPBD in 2019 approximately 326 events, the highest disasters were fires, landslides and floods. The purpose of this study was to determine community preparedness with a qualitative method with a descriptive approach. The process of collecting data is by observation, interview and documentation. The results of the study there are 4 items: organizational elements, counseling and training, disaster mitigation, risk, danger, vulnerability, ability, and 4 stages of training. A study of these four items is very useful for communities in potential disaster areas.

Keywords: Management, Preparedness and Potential Disasters.

ABSTRAK

Manajemen Kesiapsiagaan menghadapi bencana Pemerintah Daerah Sumedang bersinergi dengan TNI/Polri, Basarnas, BPBD, dan Relawan Kebencanaan. Data dari BPBD Sumedang tahun 2019 kurang lebih 326 kejadian bencana, yang paling tinggi adalah kebakaran, longsor dan banjir. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesiapsiagaan masyarakat dengan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Proses pengambilan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian terdapat 4 item yaitu: unsur organisasi, penyuluhan dan pelatihan, mitigasi bencana, resiko, bahaya, kerentanan, kemampuan, dan 4 tahap pelatihan. Kajian tentang keempat item tersebut sangat berguna bagi masyarakat di wilayah potensi bencana.

Kata Kunci: Manajemen, Kesiapsiagaan, dan Potensi Bencana.

PENDAHULUAN

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Sumedang yang tersebar dalam 26 kecamatan merupakan daerah berbukit dan pegunungan dengan ketinggian antara 25 m – 1.667 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah berupa pegunungan/dataran tinggi, kecuali di sebagian kecil wilayah utara berupa dataran rendah. Terdapat Gunung (Tampomas (1.667 m) yang berada di utara perkotaan Sumedang. Kondisi ini menyebabkan potensi terjadinya bencana pergerakan tanah/longsor makin tinggi diseluruh kecamatan di Sumedang, khususnya di musim hujan.

Berdasarkan gambaran umum rata-rata 43,73 persen wilayah Kabupaten Sumedang terletak pada kisaran ketinggian 501 – 1000 m dpl. Secara umum klasifikasi kelas ketinggian wilayah Kabupaten Sumedang dapat dibagi atas:

1. 20 – 100 meter di atas permukaan laut, meliputi:
Sebagian besar wilayah Kecamatan Tomo serta Kecamatan Ujungjaya serta sebagian kecil bagian utara Kecamatan Buahdua dan Kecamatan Surian.
2. 101 – 500 meter dari permukaan laut, meliputi:
Sebagian besar Kecamatan Surian, Buahdua, Conggeang, Paseh, Tanjungkerta, Situraja, Cisitu, Jatigede dan Kecamatan Jatinunggal, serta sebagian kecil wilayah Kecamatan Wado, Darmaraja, Sumedang Utara, Sumedang Selatan dan Kecamatan Tanjungmedar.
3. 501 – 1000 meter dari permukaan laut, meliputi:
Sebagian besar wilayah Kecamatan Cimalaka, Cisarua, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tanjungmedar, Rancakalong, Pamulihan, Tanjungsari, Jatinunggal, Cimanggung, Paseh dan Cibugel, serta sebagian kecil wilayah Kecamatan Tanjungkerta, Buahdua, Conggeang dan Kecamatan Wado.

4. Lebih dari 1000 meter dari permukaan laut, meliputi:

Sebagian besar wilayah Kecamatan Sukasari, Cimanggung dan Cibugel, serta sebagian kecil wilayah Kecamatan Rancakalong, Pamulihan, Sumedang Selatan, Situraja, Darmaraja, Wado, Paseh, Conggeang, Buahdua dan Cimalaka yang merupakan puncak Gunung Tampomas.

Sedangkan untuk kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi besarnya erosi. Selain memperbesar jumlah aliran permukaan, makin curamnya lereng juga memperbesar kecepatan aliran permukaan yang selanjutnya memperbesar energi angkut air. Jika lereng permukaan tanah menjadi dua kali lebih curam maka banyaknya erosi persatuan luas akan menjadi 2.0 – 2.5 kali lebih banyak.

Berdasarkan gambaran umum tersebut, diketahui kelas kemiringan lereng terjadi di Kabupaten Sumedang terdiri dari kelas 1 (satu) hingga kelas 6 (enam). Kelas kemiringan lereng yang dominan di Kabupaten Sumedang adalah kelas 4, sedangkan kelas 1, 2 dan 3 nampak seimbang. Kemudian kemiringan yang paling sedikit adalah kelas kemiringan 6 (enam). Semakin tinggi kelas kemiringan lereng maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya erosi yang akan mempengaruhi tingkat sedimentasi.

1. 0 – 8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 8,24%. Kemiringan wilayah dengan tipe ini dominan di bagian timur laut Kabupaten Sumedang yaitu pada Kecamatan Ujungjaya, Tomo dan sebagian dari Kecamatan Conggeang, Kecamatan Surian pada bagian utaranya.
2. 8 – 15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 8,37%. Wilayah Kabupaten

Sumedang yang dominan dengan kemiringan tipe ini terletak di bagian tengah dan utara, bagian barat laut serta bagian barat daya yaitu pada bagian selatan Kecamatan Surian dan Kecamatan Conggeang.

3. 15 – 25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 46,38%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di Wilayah Kabupaten Sumedang, persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat yaitu pada Kecamatan Tanjungkerta, Tanjungkerta, Buahdua, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Cilaku, Situraja, Sumedang Utara, Jatinunggal dan Kecamatan Jatigede.
4. 25 – 45%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 21,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur yaitu Kecamatan Cimanggung, Jatinangor, Pamulihan, Ganeas, Cibugel, Sumedang Selatan, dan pada bagian selatan Kecamatan Wado.
5. 45-60%, merupakan daerah bergunung dengan luas area sekitar 18% yang dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur serta bagian barat yaitu pada Kecamatan Sukasari, Cimanggung dan Kecamatan Wado.
6. >60%, merupakan daerah terjal dan mempunyai area di sekitar pegunungan yang berada di sekitar Kabupaten Sumedang seluas 1,43%. Kemiringan ini berada pada Kecamatan Surian, Cimanggung, Cibugel dan Kecamatan Wado. (Sumber: Bappeda Kab. Sumedang)

Dengan demikian berdasarkan topografi di atas bahwa Kabupaten Sumedang berpotensi terhadap bencana terutama banjir, longsor dan badai. Sehubungan hal tersebut Kabupaten Sumedang dalam rangka menghadapi potensi bencana memerlukan beberapa persiapan-persiapan bagi manajemen kesiapsiagaan dalam potensi bencana yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dan rencana perbaikan.

Paradigma kebencanaan yang ke belakang berfokus pada penanganan kedaruratan saja sekarang mengalami perubahan paradigma menjadi pengurangan risiko bencana yang diwujudkan dalam bentuk kesiapsiagaan aparat dan masyarakat. Pergeseran paradigma ini telah mendorong perubahan radikal cara pandang terhadap penanggulangan bencana. Jika sebelumnya penanggulangan bencana merupakan tindakan yang terbatas pada keadaan darurat saja, sekarang dan ke depan penanggulangan bencana dipandang sebagai suatu upaya yang menitikberatkan kepada manajemen kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.

Hal ini sejalan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja tetapi melibatkan seluruh unsur masyarakat. Secara konkrit, upaya yang dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan peran dari masyarakat yang berpijak pada kemitraan publik dengan pengurangan resiko bencana yang tidak mengesampingkan muatan lokal dan kearifan lokal di masing-masing daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah manajemen kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Sumedang?; 2) Bagaimanakah kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam

penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang? Kemudian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Sumedang serta kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Sumedang.

KAJIAN TEORI

Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Manajemen kesiapsiagaan yang melibatkan semua unsur dan atau lapisan dari pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam Undang-undang RI No. 24 Tahun 2007 memfokuskan pada 5 aspek yaitu:

1. Perencanaan, mengkaji bagaimana rencana tanggap darurat yang meliputi prosedur tetap dan pembagian tugas masing-masing elemen sesaat setelah bencana terjadi.
2. Pengorganisasian, mengkaji pengorganisasian dan pelatihan, yaitu pembentukan organisasi masyarakat yang siaga bencana serta pelatihan untuk peningkatan pengetahuan. Pengorganisasian dan pelatihan ini perlu dilakukan agar masyarakat yang berisiko bencana mempunyai wadah untuk mengembangkan diri, baik itu

melalui pelatihan atau memberikan contoh bagi yang lainnya.

3. Aksi, melihat bagaimana pelaksanaan dari perencanaan yang sudah disusun oleh organisasi yang sudah terbentuk. Komponen yang termasuk dalam aspek ini berupa sistem peringatan dini, penyediaan kebutuhan dasar, lokasi evakuasi, dan penyediaan barang serta peralatan pemulihan prasarana dan sarana.
4. Kontrol, mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berada di luar organisasi masyarakat ini, seperti pemerintah setempat yang berwenang. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasi kebencanaan akan memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat.
5. Evaluasi yaitu penilaian terhadap bencana yang dilakukan pada saat simulasi ataupun pada saat bencana benar-benar terjadi

Manajemen kesiapsiagaan bencana merupakan bentuk sinergitas dari pemerintah dan organisasi terkait yang berperan dalam pemerintahan yang dapat mengupayakan maju dan mundurnya suatu organisasi pemerintahan dalam pencapaian tujuan tertentu yang dapat menimbulkan rasa nyaman pada masyarakat di daerahnya, Menurut Warfo (2002:23) mengemukakan bahwa manajemen kesiapsiagaan bencana merupakan suatu proses penting dalam menyikapi dan pengambilan tindakan dan penyelesaian pasca bencana yang melalui proses lintas sektoral yang bersinergi dan terintegrasi serta berkelanjutan dalam mencegah dan menangani bencana, yang meliputi mitigasi, kewaspadaan, tanggapan terhadap bencana serta upaya pemulihan.

Sedangkan Susanto (2006:10) mengatakan manajemen bencana yaitu sebuah proses yang terus menerus dimana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil merencanakan dan mengurangi pengaruh bencana, mengambil tindakan segera setelah bencana terjadi, dan mengambil langkah-langkah untuk pemulihan.

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat merupakan salah satu kunci utama dari konsep kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap dan perilaku terutama dalam mengantisipasi setiap kejadian bencana yang terjadi. Menurut LIPI-UNESCO, (2006:17) mengatakan bahwa Kesiapsiagaan merupakan faktor penting yang menjadi fokus perhatian dewasa ini mengingat kesiapsiagaan adalah faktor penentu untuk pengurangan resiko bencana yang dapat dilakukan dan diupayakan sejak dini. Kesiapsiagaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, lembaga penanggulangan bencana dalam hal ini adalah Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Barat, PMI Kabupaten Sumedang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang harus mampu untuk berkoordinasi dan saling bekerjasama.

Sedangkan menurut Dodon (2013:27) mengkaji kesiapsiagaan dilihat dari 5 indikator yang diadopsi dari LIPI yaitu: pengetahuan dan sikap, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, sumberdaya pendukung dan modal sosial. Selanjutnya Purwana (2013) mengatakan bahwa masyarakat menyadari atas keterlibatannya dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan, karena secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi mereka. Disinilah perlunya manajemen yang bisa memberikan arahan dan aturan sehingga bisa mengetahui apa yang mereka harus lakukan untuk kedepannya. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat yang memberikan peningkatan

kapasitas masyarakat dapat berupa fisik dan non-fisik. Kegiatan fisik seperti pemanfaatan lahan dengan tepat dan penyediaan tempat evakuasi. Sedangkan peningkatan kapasitas non-fisik seperti mempelajari gejala alam untuk mengetahui tanda-tanda datangnya bencana, sampai saling mengingatkan di antara sesama untuk siaga dapat membentuk kesiapsiagaan sebagai budaya dalam komunitas masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen kesiapsiagaan mempunyai bentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna, sehingga upaya yaitu: 1) merencanakan kontijensi; 2) sistem peringatan dini dan 3) rencana kesiapan mengambil tindakan untuk menjamin ketersediaan sumberdaya untuk memenuhi kondisi darurat yang sudah diperkirakan sebelumnya.

Selanjutnya, potensi bencana merupakan terjangkitnya wabah atau peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan korban jiwa. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 yaitu: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu: bencana alam dan bencana non alam

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial atau kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

METODE

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta-fakta di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2009:3), menyatakan pendekatan kualitatif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Sedangkan pendapat Nazir (2005:63) bahwa metode deskriptif merupakan metode yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling *purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah empat informan dari pemerintah daerah kabupaten Sumedang, TNI/Polri, BPBD dan enam informan dari masyarakat. Fokus dalam penelitian ini adalah pertama, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pemerintah kabupaten Sumedang, TNI/Polri, BPBD meliputi pemberian pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana sebagai *response* dan *recovery*; kedua, kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Potensi Bencana Di Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang dalam menghadapi potensi bencana bersinergi antar bagian yang saling bahu membahu untuk mengantisipasi bencana yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dari hal tersebut pemerintah kabupaten Sumedang membangun kesadaran kewaspadaan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang dibagi menjadi 4 tahap yaitu: 1) tahap perencanaan; 2) tahap persiapan; 3) tahap pelaksanaan dan ke 4) tahap evaluasi dari semua tahapan untuk pemberian pelatihan kesiapsiagaan baik pada sumber daya manusia dalam organisasi maupun sumberdaya masyarakat yang terkena langsung dampak bencana.

1.1 Tahap Perencanaan Pembentukan Tim Perencana

Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pembentukan tim perencanaan yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk organisasi latihan kesiapsiagaan agar pelaksanaan evakuasi berjalan dengan baik dan teratur.
2. Tim Perencana terdiri dari pengarah, penanggung jawab, bidang perencanaan, yang ketika pelaksanaan tim perencana berperan sebagai tim pengendali. Fungsi masing-masing, adalah:
 - a. Pengarah, bertanggung jawab memberi masukan yang bersifat kebijakan untuk penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan, dan

- dapat memberikan masukan yang bersifat teknis dan operasional, mengadakan koordinasi, serta menunjuk penanggung jawab organisasi latihan kesiapsiagaan.
- b. Penanggung Jawab, membantu pengarah dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat kebijakan, teknis, dan juga operasional dalam rangka penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan.
 - c. Bidang Perencanaan/Pengendali, merencanakan Latihan kesiapsiagaan secara menyeluruh, sekaligus menjadi pengendali ketika latihan dilaksanakan.
 - d. Bidang Operasional Latihan, menjalankan perannya saat Latihan, yang terdiri dari Peringatan Dini, Pertolongan Pertama, Evakuasi dan Penyelamatan, Logistik serta Keamanan turut diuji dalam setiap latihan.
 - e. Bidang Evaluasi, mengevaluasi latihan kesiapsiagaan yang digunakan untuk perbaikan latihan kedepannya.
3. Jumlah anggota tergantung tingkat kompleksitas latihan yang dirancang sebanyak 4 organisasi yang terhimpun dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, TNI/POLRI, BPBD, dan anggota masyarakat dan LSM dari 26 Kecamatan.
 4. Anggota organisasi bertanggung jawab pada perencanaan, pelaksanaan, hingga akhir latihan.
 5. Tugas dari tim perencana ini meliputi:
 - a. Menentukan risiko/ancaman yang akan disimulasikan.
 - b. Menentukan skenario bencana yang akan disimulasikan.
 - c. Merumuskan strategi dalam pelaksanaan latihan kesiapsiagaan.
 - d. Menyiapkan kerangka kegiatan simulasi kesiapsiagaan (tipe simulasi, maksud, tujuan dan ruang lingkup latihan).
 - e. Mengintegrasikan kegiatan simulasi kesiapsiagaan menjadi kegiatan rutin dalam jangka panjang.
 - f. Menetapkan jadwal kegiatan latihan kesiapsiagaan.
 - g. Mendukung persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi latihan.
 - h. Menyiapkan Rencana Tindak Lanjut setelah pelaksanaan kegiatan latihan kesiapsiagaan.

Menyusun Rencana Latihan Kesiapsiagaan

Menyusun rencana latihan kesiapsiagaan (aktivasi sirene dan evakuasi mandiri) yang melibatkan populasi di lingkungan tempat tinggal, kantor, sekolah, area publik, dan lain-lain. Rencana latihan tersebut berisi:

1. Tujuan, sasaran, dan waktu pelaksanaan latihan kesiapsiagaan.
2. Jenis ancaman yang dipilih atau disepakati untuk latihan kesiapsiagaan. Sebaiknya, latihan disesuaikan dengan ancaman di wilayah masing-masing. Informasi ancaman bisa dilihat di inarisk.bnppb.go.id
3. Membuat skenario latihan kesiapsiagaan. Skenario adalah acuan jalan cerita kejadian yang dipakai untuk keperluan latihan. Skenario dibuat berdasarkan kejadian yang

- paling mungkin terjadi. Skenario perlu dipahami oleh pelaksana dan peserta yang terlibat dalam latihan (contoh terlampir).
4. Menyiapkan atau mengkaji ulang SOP/Protap yang sudah ada yaitu memastikan kembali:
 5. Memastikan beberapa area/tempat alternatif yang akan dijadikan Sebagai pusat evakuasi, tempat pengungsian maupun tempat perlindungan sementara. Tempat tersebut bisa memanfaatkan bangunan, seperti kantor, sekolah, tempat ibadah, gedung, dan area terbuka lainnya berdasarkan keamanan, aksesibilitas, juga lingkungan lokasi.
 6. Menentukan tempat pengungsian yang dipilih setelah mempertimbangkan kapasitas ketersediaan logistik (seperti makanan atau minuman, pakaian, obat-obatan dan peralatan medis, keperluan tidur, peralatan kebersihan, bahan bakar, dan lain-lain), serta ketersediaan fasilitas umum.
 7. Menetapkan dan menyiapkan jalur evakuasi, dengan memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut:
 - a. Jalur evakuasi yang merupakan rute tercepat dan teraman bagi pengungsi menuju tempat pengungsian.
 - b. Rute alternatif selain rute utama.
 - c. Kesesuaian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat
 - d. Kelengkapan sumber daya termasuk ketersediaan kendaraan yang dapat digunakan dalam proses evakuasi. Penting juga mempertimbangkan posisi kendaraan dan jumlah minimum muatan jika dibutuhkan.
 - e. Peta evakuasi berdasarkan hasil survei dan desain yang menginformasikan jalur evakuasi, tempat pengungsian dan waktu untuk mencapainya, jalur alternatif, lokasi-lokasi aman bencana, serta posisi posko siaga tim evakuasi.
 8. Orientasi sebelum Latihan
 - a. Sosialisasi untuk mendapat pembelajaran terbaik, seluruh peserta latih dan pelaksana yang terlibat perlu memahami tujuan dari latihan. Tidak dianjurkan membuat latihan tanpa kesiapan yang baik dari peserta latih maupun pelaksana.
 - b. Perkenalkan kembali pemahaman risiko bencana di lingkungan, sebelum dan sesudah latihan dilakukan
 - c. Sampaikan tujuan latihan, waktu pelaksanaan dan hal-hal yang perlu dipersiapkan
 - d. Himbau pentingnya keterlibatan aktif dan keseriusan semua pihak dalam mengikuti latihan
 - e. Sampaikan tanda bunyi yang akan digunakan dalam latihan, tanda latihan dimulai, tanda evakuasi, tanda latihan berakhir). Pastikan seluruh peserta latih memahami tanda ini.
 9. Dalam melaksanakan latihan, yang akan melakukan simulasi juga dapat mengundang pengamat atau observer untuk membantu memberikan

masuk dan umpan balik proses latihan, untuk perbaikan ke depan.

10. Perencanaan Dokumentasi. Bagian penting lainnya dari kegiatan latihan kesiapsiagaan adalah dokumentasi. Diperlukan berbagai macam dokumentasi sebagai salah satu alat untuk pelaporan maupun monitoring dan evaluasi. Kegiatan pendokumentasian ini dilakukan pada keseluruhan tahap kegiatan penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan hingga selesainya pelaksanaan simulasi bencana. Dokumentasi kegiatan tidak hanya berupa foto dan video saja, tetapi juga mencakup laporan, dokumen-dokumen output termasuk peta-peta, surat edaran, manual latihan/SOP, dokumen skenario dan SOP simulasi, formulir evaluasi (atau panduannya jika ada), kumpulan catatan masukan, rencana perbaikan dan tindak lanjut, ringkasan laporan dan rekomendasi.

1.2 Tahap Persiapan

Persiapan dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan latihan kesiapsiagaan. Dalam persiapan ini yang terutama dilakukan adalah:

1. *Briefing-briefing* untuk mematangkan perencanaan latihan. Pihak-pihak yang perlu melakukan briefing antara lain tim perencana, peserta simulasi, dan tim *evaluator/observer*. Informasi penting yang harus disampaikan selama kegiatan ini, yakni:
 - a. Waktu: alur waktu dan durasi waktu simulasi yang ditentukan sesuai PROTAP/SOP simulasi.
 - b. Batasan Simulasi: batasan-batasan yang ditentukan selama simulasi, berupa apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan selama simulasi.
 - c. Lokasi: tempat di mana simulasi akan dilakukan.
 - d. Keamanan: hal-hal yang harus dilakukan untuk keamanan simulasi dan prosedur darurat selama simulasi.
2. Memberikan poster, *leaflet*, atau surat edaran kepada siapa saja yang terlibat latihan kesiapsiagaan.
3. Menyiapkan gedung dan beberapa peralatan pendukung, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Misalnya, gedung dan fasilitas medis, persediaan barang-barang untuk kondisi darurat, dan lain-lain.
4. Memasang peta lokasi dan jalur evakuasi di tempat umum yang mudah dilihat semua orang.

1.3 Tahap Pelaksanaan

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat Latihan Kesiapsiagaan Berlangsung:

1. Tanda Peringatan
Tentukan tiga tanda peringatan berikut: Tanda latihan dimulai (bencana); Tanda Evakuasi; Tanda Latihan Berakhir. Tanda bunyi yang menandakan dimulainya latihan, tanda evakuasi, dan tanda latihan berakhir. Tanda mulainya latihan dapat menggunakan tiupan peluit, atau tanda bunyi lainnya. Tanda ini harus berbeda dengan tanda peringatan dini untuk evakuasi seperti pukulan lonceng/sirene/megaphone/bel panjang terus-menerus dan cepat, atau yang telah disepakati. Tanda latihan berakhir dapat kembali menggunakan peluit panjang.
2. Reaksi Terhadap Peringatan
Latihan ini ditujukan untuk menguji reaksi peserta latih dan prosedur yang ditetapkan. Pastikan semua peserta

latih, memahami bagaimana harus bereaksi terhadap tanda-tanda peringatan di atas. Seluruh komponen latihan, harus bahu membahu menjalankan tugasnya dengan baik.

3. Dokumentasi

Rekamlah proses latihan dengan kamera foto. Jika memungkinkan, rekam juga dengan video. Seluruh peserta latihan, pelaksana maupun yang bertugas, dapat bersama-sama melihat hal-hal yang baik atau masih perlu diperbaiki secara lebih baik dengan rekaman dokumentasi

1.4 Tahap Evaluasi Dan Rencana Perbaikan

Evaluasi adalah salah satu komponen yang paling penting dalam latihan. Tanpa evaluasi, tujuan dari latihan tidak dapat diketahui, apakah tercapai atau tidak. Dalam mengevaluasi latihan, beberapa hal berikut ini perlu dipertimbangkan:

- 1) Apakah peserta memahami tujuan dari latihan?
- 2) Siapa saja yang berperan aktif dalam latihan?
- 3) Bagaimana kelengkapan peralatan pendukung latihan?
- 4) Bagaimana respon peserta latihan?
- 5) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam setiap langkah latihan?
- 6) Apa hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang masih perlu diperbaiki?

2. Potensi Bencana Di Kabupaten Sumedang

Kondisi geografis, geologis, dan demografis Kabupaten Sumedang berpotensi bencana. Dengan demikian sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab 1, tentang ketentuan umum, pasal 1, jenis-jenis bencana dapat dikelompokkan menjadi bencana alam, antara lain (1) gempa bumi, (2) tsunami,

(3) gunung meletus, (4) banjir, (5) kekeringan, (6) angin topan, (7) tanah longsor. Sedangkan bencana non alam, seperti (8) gagal teknologi, (9) gagal modernisasi, (10) epidemi, (11) wabah penyakit, dan (12) bencana sosial berupa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, (13) teror.

Berdasarkan dari jenis-jenis bencana tersebut, terdapat empat bencana yang paling riskan mengancam daerah-daerah di Kabupaten Sumedang yaitu: kebakaran gedung, banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Di Kabupaten Sumedang di musim penghujan, bencana yang mengancam di seluruh wilayah kecamatan kabupaten Sumedang yaitu potensi bencana pergerakan tanah dan atau longsor.

Menurut Kepala BPBD Kabupaten Sumedang Ayi Rusmana yang didampingi oleh Yedi, Kasi Kedaruratan dan Logistik mengatakan bahwa:

"Dari 26 kecamatan, seluruh wilayah rawan bencana pergerakan tanah dengan tingkat kerawanan menengah hingga tinggi, yang disebabkan oleh topografi Kabupaten Sumedang merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini menyebabkan potensi terjadinya bencana pergerakan tanah/longsor makin tinggi diseluruh kecamatan di Sumedang. Berkaca dari peristiwa bencana yang terjadi sepanjang tahun 2018, di Kabupaten Sumedang, telah terjadi 280 kejadian bencana. "Selain bencana pergerakan tanah atau longsor, dengan tingginya intensitas curah hujan yang terjadi sejak awal 2019, kami juga mengimbau warga tetap waspada terhadap datangnya bencana banjir bandang, angin puting beliung, dan pohon tumbang."

Kemudian Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengemukakan bahwa:

“...telah memberikan peringatan terkait kerawanan bencana di seluruh kecamatan di Sumedang. Namun, tidak berarti desa di tiap kecamatan tersebut sangat rawan berpotensi terjadi bencana. Tapi jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, kamiimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaannya. Wilayah yang paling rawan pergerakan tanah alias longsor merupakan daerah yang berdekatan dengan aliran sungai dan wilayah dengan kemiringan tanah lebih dari 40 derajat. Kewaspadaan ini patut ditingkatkan di musim penghujan seperti sekarang ini. Untuk itu, kami telah memberikan imbauan berupa peringatan agar warga, khususnya pemerintah kecamatan di Sumedang lebih meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menghadapi kemungkinan terburuk, terjadinya bencana di wilayah masing-masing”.

Sedang menurut pemerintah melalui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat untuk potensi bencana di Kabupaten Sumedang telah ditetapkan bahwa Desa Cimanintin, Kecamatan Jati Nunggal, Kabupaten Sumedang sebagai Kampung Siaga Bencana (KSB) ke 628, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana, membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat, mengorganisasikan masyarakat terlatih untuk siaga bencana, serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada dalam penanggulangan bencana, sehingga khususnya kesiagaan warga Dusun Cimanintin sangat dibutuhkan untuk meminimalisir korban. Dusun ini sangat rawan bencana. Dusun ini merupakan KSB ke 5 di Kabupaten Sumedang,

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat Sinergitas Manajemen Kesiapsiagaan Potensi bencana alam oleh pemerintah daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 3 tahapan yaitu: tahapan *response*, *recovery* dan *development*. Dari ke 3 tahapan tersebut yang paling menonjol dilakukan adalah pada tahapan *response* bencana.
2. Adanya *Response* bencana dari BMKG yaitu: mengirim tim reaksi cepat untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat melalui tindakan sebelum dan sesudah terjadinya bencana untuk meminimalisir adanya korban.
3. Adanya partisipasi Masyarakat dalam bentuk partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda keterampilan dan kemahiran, serta partisipasi sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi paling menonjol yang dilakukan masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah partisipasi tenaga dan partisipasi sosial.
4. Manajemen Kesiapsiagaan Kabupaten Sumedang memberikan pelatihan dalam menghadapi potensi bencana di kabupaten Sumedang yang meliputi: 1) tahap perencanaan; 2) tahap persiapan; 3) tahap pelaksanaan dan ke 4) tahap evaluasi dari semua tahapan untuk pemberian pelatihan kesiapsiagaan baik pada sumber daya manusia dalam organisasi maupun sumberdaya masyarakat yang terkena langsung dampak bencana.

Dari hal tersebut di atas, dari Manajemen Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Sumedang pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik, namun perlu lebih meningkatkan lagi dalam menghadapi potensi bencana yang didukung oleh pengalokasian dana yang cukup sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dan sinergitas dari berbagai lapisan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut yaitu

1. Melakukan upaya mitigasi banjir yang merupakan bencana dengan intensitas paling tinggi dengan kegiatan struktural dan non-struktural yang dilakukan melalui:
 - a. kegiatan struktural dengan pembangunan tanggul-tanggul di pinggir sungai pada titik-titik daerah rawan banjir yang bertujuan mencegah meluapnya air pada tingkat ketinggian tertentu ke daerah rawan banjir, dan pembangunan kanal-kanal yang bertujuan menurunkan tingkat ketinggian air di daerah aliran sungai dengan menambah dan mengalihkan arah aliran sungai
 - b. kegiatan non-struktural dengan pengawasan penegak hukum terhadap peran masyarakat dalam menaati ketentuan penggunaan tata ruang dan pola pembudidayaan dataran banjir dan das hulu, untuk menghindari penyempitan dan pendangkalan alur sungai akibat sampah padat maupun bangunan/hunian dan tanaman di bantaran sungai.
2. Unit pelaksana pemerintah daerah melakukan koordinasi lebih intensif agar penanganan bencana menjadi efektif, juga melakukan koordinasi-koordinasi agar dunia usaha mau berperan serta dalam penanggulangan bencana.
3. Penambahan SDM yang berkompeten dalam penanggulangan bencana untuk ditempatkan di BPBD.
4. Mengurangi resiko dengan menjadikan pembangunan adalah investasi, segala kegiatan pembangunan dikaitkan dengan ancaman bencana.
5. Sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat tetap dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana. Disamping itu pemberian pengetahuan tentang kebencanaan kepada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah juga diperlukan, bukan hanya sosialisasi kepada masyarakat yang sudah terbelah dewasa.
6. Menyeimbangkan partisipasi masyarakat agar tidak hanya partisipasi tenaga dan sosial saja yang menonjol, tetapi partisipasi buah pikiran, harta benda, keterampilan dan kemahiran terus dilatih karena tingginya ketiga partisipasi tersebut juga dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- BPBD Kabupaten Sumedang. 2017. *Buku Pedoman Penanggulangan Bencana*. BPBD press.
- Carter, W. Nick. (1991). *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*, Manila: Asian Development Bank.
- Dodon. 2013. Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Masyarakat Di Permukiman Padat Penduduk Dalam Antisipasi Berbagai Fase Bencana Banjir. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 24.2: 125-140
- Kementerian Sosial RI. 2011. *Himpunan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial*.
- Kementerian Sosial RI. 2011. *Modul Petugas Pendamping Sosial Penanggulangan Bencana*.
- LIPI – UNESCO/ISDR, 2006, *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami*, Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta
- Moleong, L.J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Ghalia.
- Purwana. R., 2013. *Manajemen Kedaruratan Kesehatan Lingkungan Dalam Kejadian Bencana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rohman, A., Putra, F., Riansyah, L. & Arif, S. (2009). *Politik, Partisipasi dan demokrasi dalam Pembangunan*. Malang: Averroes Press.
- Susanto, A.B. 2006. *Disaster Management di Negeri Rawan Bencana*. Jakarta: Aksara Grafika Pratama.
- Warto, A., Sunit, T. & Nugroho P. P. 2002. *Pengkajian Manajemen Penanggulangan Korban Bencana pada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Departemen Sosial RI.